



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 21 September 2021

Halaman: 2

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA Telp.(0274) 540650

GRATISKAN BIAYA PEMAKAMAN WARGA KURANG MAMPU
Mendesak, Kebutuhan Lahan Makam Baru

YOGYA (KR) - Lahan pemakaman yang dikelola Pemkot Yogya kondisinya sudah cukup kritis. Kebutuhan lahan makam baru pun sudah cukup mendesak untuk segera diadakan oleh pemerintah. Terutama guna memberikan solusi bagi warga kurang mampu.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogya Sigit Wicaksono, menilai biaya untuk pengurusan pemakaman tidak bisa dibilang murah. "Bagi warga kurang mampu itu bisa menjadi beban. Memang sudah ada santunan kematian bagi pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS), tetapi tidak bisa menjadi solusi jangka panjang karena setiap tahun biayanya akan semakin besar," urainya.

Oleh karena itu, salah satu solusi ialah pengadaan lahan pemakaman baru. Kendati ketersediaan lahan kosong di Kota Yogya sudah sulit, namun imbuhnya, Pemkot bisa menyediakan lahan di daerah lain yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Penyediaan tersebut bisa memanfaatkan aset Pemkot yang berada di wilayah perbatasan. Sistem pengelolaan bahkan dibuat UPT agar penanggung-

SIGIT WICAKSONO
Fraksi Partai NasDem

jawabnya jelas dan profesional.

Lokasi di sekitar lahan pemakaman baru pun bisa difungsikan sebagai ruang publik untuk peluang tumbuhnya aktivitas ekonomi. Seperti area ruang tunggu bagi peziarah, tempat parkir hingga penjualan kebutuhan peziarah. Hal ini guna menjadikan kawasan tersebut sebagai wisata religi. Sehingga perlu ada karakteristik tertentu yang bisa menjadi daya tarik pengunjung. "Ini bisa menjadikan peluang tumbuhnya denyut nadi ekonomi di sekitarnya. Peziarah pun bisa semakin nyaman dan warga yang berada di kawasan pemakaman turut merasakan manfaat," tandasnya.

Sigit mengaku, dengan adanya lahan pemakaman baru, Pemkot pun dapat melakukan intervensi kebijakan bagi warga kurang mampu. Terutama dengan menggratiskan biaya pemakaman warga kurang mampu tersebut atau setidaknya tarif retribusi yang jauh lebih murah dan tidak membebani. "Kesejahteraan tim bedah bumi juga perlu diperhatikan sehingga setiap ada pemakaman tidak terjadi pungutan-pungutan lagi," katanya. (Dhi)-d

KR-istimewa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Ketua DPRD Kota Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat DPRD Kota			
3. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 29 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005